

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penulisan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan suku. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dengan kesatuan lainnya berdasarkan akar budaya dan identitasnya, khususnya Bahasa. Dengan kata lain, etnisitas adalah sekelompok orang yang terikat oleh kesadaran dan identitas, seringkali diperkuat oleh kesatuan Bahasa (Koentjaraningrat, 1979). Sementara itu, etnis Tionghoa adalah semua pendatang dan keturunannya yang hidup dalam budaya Indonesia dan tidak bergantung pada kebangsaan, Bahasa budaya Tionghoa yang mencakup segala hal, dan mereka yang menganggap dirinya Tionghoa atau dianggap Tionghoa menurut lingkungannya. Dengan demikian, etnis Tionghoa tetap memegang teguh norma, nilai, dan budayanya.

Etnis Tionghoa di Jawa sudah lebih dulu menetap sebelum Belanda tiba di Indonesia. Namun segala sesuatu tentang masyarakat etnis Tionghoa, pola tingkah laku dan lain sebagainya di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan juga di beberapa daerah lain yang dikenal saat ini, berasal dari zaman penjajahan, yaitu zaman Hindia Belanda (Ham, 2008, Hlm. 1). Dua bangsa yakni etnis Tionghoa dan Belanda justru datang ke Indonesia untuk urusan berdagang. Belanda berdagang dalam bentuk VOC dan etnis Tionghoa juga datang ke Indonesia untuk berdagang. Karena alasan berdagang tersebut, etnis Tionghoa bermigrasi atau berdiaspora dari negeri asalnya Tiongkok ke Nusantara dan bahkan banyak yang menetap dan berakulturasi dengan masyarakat Pribumi Nusantara (Suryadinata, 1988, Hlm. 1-2).

Pada awalnya Belanda tidak datang ke Indonesia secara berbondong-bondong. Itu sebabnya negara asing selalu membutuhkan mitra bisnis dan pada akhirnya Etnis Tionghoa menjadi mitra bisnis Belanda, terutama di sektor distribusi bukan di sektor perdagangan perantara. Etnis Tionghoa mendistribusikan barang dari kota kepada penduduk asli di desa, mereka menerima uang tembaga dari masyarakat yang tinggal di desa, yaitu uang untuk membeli barang di desa. Mereka kemudian

menjualnya kepada VOC di kota. Hal tersebut membuat hubungan mereka menjadi kuat.

Masyarakat Pribumi menyambut kedatangan etnis Tionghoa dengan hangat dan etnis Tionghoa sendiri tidak menimbulkan masalah sosial, bahkan sebagian dari mereka sudah berasimilasi dengan penduduk Pribumi hingga menimbulkan akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Tetapi keharmonisan yang ada tidak bertahan lama setelah kedatangan Belanda di nusantara. Belanda menerapkan strategi untuk memisahkan kedua kelompok tersebut sehingga membentuk stratifikasi masyarakat (Chessiagi, 2018). Salah satu kebijakan yang diterapkan pada masa Hindia Belanda adalah apa yang disebut dengan sistem *Apartheid* yang menjadi salah satu politik pecah belah. Melalui sistem *Apartheid* ini, etnis Tionghoa mulai memisahkan diri dari golongan Pribumi. Dari sistem tersebut masyarakat Hindia Belanda terbagi menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama golongan Eropa atau Belanda, yang kedua golongan Timur Asing yang meliputi etnis Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain, dan yang ketiga adalah kelompok masyarakat Pribumi (Ham, 2008, Hlm. 3).

Pemisahan pemukiman awalnya bermula dari kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 9 Oktober 1740 terjadi pemberontakan besar-besaran di Batavia yang juga melibatkan orang Tionghoa. Pemberontakan tersebut terjadi karena ada semacam ancaman dari opsir Tionghoa kepada pemerintah Hindia Belanda. Opsir Tionghoa atau Kapitan Tionghoa adalah sistem yang dibuat oleh Hindia Belanda untuk orang-orang yang menjadi pemimpin suatu kelompok atau etnis (Suryadinata, 2014). Peran Kapitan Tionghoa ini adalah menjelaskan peraturan pemerintah kolonial kepada etnis Tionghoa dan memungut pajak dari etnis Tionghoa. Namun kaum nasionalis Tionghoa memandang sistem ini sebagai simbol kepentingan Belanda dan tidak menghormati etnis Tionghoa. Sistem tersebut kemudian dihapus karena tidak berguna lagi.

Lalu ada Sistem *Wijkenstelsel* yang diterapkan pada masyarakat yang secara fisik mengisolasi setiap kelompok penduduk dari penduduk lainnya. Sistem ini memaksa warga untuk tinggal di kampung-kampung yang terpisah, seperti

kampung Cina, kampung Belanda, dan kampung Pribumi. Maka dari itu etnis Tionghoa tidak diperbolehkan untuk bermukim di sembarang tempat. Selain itu, pakaiannya juga harus berbeda. Salah satu ciri khas etnis Tionghoa adalah laki-lakinya memakai kuncir dan berpakaian seperti orang Cina. Ketika Mayor Oei Tiong Ham dari Semarang, seorang konglomerat pertama yang bukan bangsa Eropa ingin potong kuncirnya dan memakai baju Barat, ia harus menulis petisi terlebih dahulu. Ia harus meminta izin kepada Gubernur Jenderal jika ingin memotong kuncir dan menggantinya dengan pakaian ala Barat.

Secara tidak langsung dengan dipisahkannya tempat tinggal seperti dalam sistem *Wijkenstelsel*, berdampak juga kepada kondisi sosial etnis Tionghoa. Mereka menjadi Etnis yang terpisah dan terkesan eksklusif. Sebagaimana dikemukakan oleh Coppel (1994, hlm. 26) dalam buku Cina Indonesia dalam Krisis bahwa:

“Orang Cina itu suka berkelompok-kelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal dikawasan tersendiri. Mereka selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negeri leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia, dalam keadaan paling baik meragukan, dalam keadaan paling buruk, bersikap bermusuhan dengan terhadap Indonesia. Orang Cina yang tampaknya memihak kepada Indonesia tidak bersungguh-sungguh hati, mereka hanya berpura-pura melakukan itu demi alasan-alasan oportunistis, kertimbang perasaan yang sebenarnya untuk memihak kepada negara dan rakyat mereka.”

Berdasarkan pada pendapat Coppel tersebut, etnis Tionghoa merupakan etnis yang tidak mau berasimilasi atau membaaur dan terkesan eksklusif. Tampaknya mereka tidak mau berasimilasi karena menganggap kelompoknya lebih unggul dibandingkan penduduk asli baik secara ekonomi maupun sosial. Sikap arogan tersebut menyebabkan etnis Tionghoa mendapat perlakuan diskriminatif di segala bidang, termasuk perekonomian. Kemampuan orang Tionghoa dalam berdagang membuat para pedagang asli tak terkalahkan. Hal ini membuat banyak pedagang Pribumi gulung tikar. Hal ini tentu menimbulkan rasa muak di kalangan penduduk Pribumi terhadap etnis Tionghoa. Rasa eksklusivitas yang mengakar pada etnis Tionghoa pada dasarnya bersumber dari dalam diri etnis Tionghoa itu sendiri, karena sikap budaya dan spiritual etnis Tionghoa di Indonesia masih melestarikan tradisi nenek moyang mereka di Tiongkok dengan model kehidupan yang berbasis pada ajaran Confusius, Taoisme dan Budhisme.

Faktor-faktor yang menyebabkan sikap eksklusifitas etnis Tionghoa bermula dari etnis Tionghoa itu sendiri dan didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda saat itu yang mendukung pemisahan kelompok atau etnis di Indonesia. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang membuat etnis Tionghoa merasa eksklusif dan adanya pandangan negatif terhadap mereka karena pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem segregasi kelompok masyarakat di Indonesia (*Apartheid*) dan pemisahan pendidikan antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Lalu didirikan sekolah khusus etnis Tionghoa yaitu *Hollandsch Chineesche School* (HCS). Selain itu ada kebijakan penetapan wilayah pemukiman menurut etnis dan golongan tertentu (*Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda menimbulkan kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Pribumi di luar sektor ekonomi. Etnis Tionghoa yang berasimilasi dengan masyarakat Pribumi lainnya dan menjadi bagian dari masyarakat Pribumi tersebut kemudian menjadi golongan yang terpisahkan, seolah-olah mereka bukan bagian dari penduduk Pribumi.

Sesungguhnya, kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan kedudukannya sangat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Banyak permasalahan yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa adalah akibat dari permasalahan yang terus berlanjut sejak di bawah pemerintahan Kolonial. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan rezim penguasa terhadap etnis Tionghoa, khususnya pada era Orde Baru, mempunyai motif yang sama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial pada saat itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa penerapan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial pada saat itu terhadap etnis Tionghoa.

Orde Baru merupakan seluruh penyelenggaraan kehidupan rakyat, berbangsa, dan bernegara Republik Indonesia yang berdasarkan pada penerapan murni Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan reaksi dan koreksi mendasar terhadap praktik-praktik ofensif yang ada di masa lalu, atau biasa kita sebut dengan Orde Lama. Pengertian Orde Baru yang di sebutkan dalam Pidato Pejabat Presiden Jendral Soeharto Kepada Sidang Kabinet AMPERA tanggal 19 April 1967, adalah :

Revina Putri Felissa, 2024

**DAMPAK KEBIJAKAN ASIMILASI MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TERHADAP PERKEMBANGAN IDENTITAS SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA TAHUN 1966-1998**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Suatu Orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikad baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat, mengabdikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 diawali dengan Surat Perintah Sebelas Maret yang kemudian disalahartikan sebagai surat peralihan kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 hingga pengumuman hasil pemilu tanggal 10 Maret 1983 beliau mendapat penghargaan sebagai bapak pembangunan nasional. Wajah demokrasi Orde Baru mengalami pasang surut sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, politik, dan ideologi yang bersifat sementara. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai dengan kebebasan politik yang besar (Fatah, 2000, Hlm. 22).

Tahun 1966 hingga 1976 merupakan masa penuh gejolak bagi etnis Tionghoa di Indonesia, ditandai dengan peristiwa G30SPKI dan peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini bermula dari sentimen anti-Tionghoa pada tahun 1966 yaitu dugaan keterlibatan PKI dalam G30S yang memicu sentimen anti-Tionghoa semakin besar. Etnis Tionghoa dicap komunis dan mengalami diskriminasi di berbagai kalangan. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya berbagai stereotipe negatif di mata masyarakat Pribumi terhadap etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa di Indonesia bukanlah minoritas yang homogen. Sejak proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelompok minoritas ini selalu dianggap sebagai penyebab permasalahan. Namun “masalahnya” tidak selalu sama, pada masa penjajahan mereka dianggap anti Belanda dan nasionalisme Indonesia, eksklusif dan tugasnya hanya mencari keuntungan, kemudian dianggap unsur komunis atau pro komunis. Belakangan ini, mereka dipandang sebagai kapitalis dan faksi yang mengeksploitasi kekayaan negara tanpa ada rasa patriotisme (Suryadinata, 2010, Hlm. 184).

Pada tahun 1966 hingga 1976, terdapat juga kebijakan untuk mengubah nama Tionghoa menjadi nama yang pengucapannya dalam Bahasa Indonesia, kebijakan yang melarang penggunaan Bahasa Mandarin pada nama media, toko atau

perusahaan, dan pada tahun 1967 terdapat kebijakan mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Pada tahun 1966 terjadi kerusuhan di berbagai tempat khususnya di Jawa Barat yaitu Cirebon, Bandung, Sumedang, Bogor, Cipayung, Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi. Penyebab kerusuhan adalah kesenjangan sosial etnis Tionghoa yang dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi saat itu. Inflasi yang tinggi, kurangnya kebutuhan pokok dan kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Frustrasi dapat dengan mudah disalurkan dengan menyasar kemarahan yang diungkapkan dalam kerusuhan anti-Tionghoa dan merupakan bagian dari perebutan kekuasaan politik antara sayap kiri dan kanan (Darini, 2011). Pemberontakan ini juga terjadi di wilayah-wilayah kecil hingga tahun 1970-an.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto memilih jalur kebijakan asimilasi yang dinilainya paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan Tionghoa di Indonesia. Adanya kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan ini dan dikendalikan oleh pihak yang berwenang, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan kembali akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya dalam bidang ekonomi dan budaya.

Kebijakan asimilasi menuntut integrasi menyeluruh masyarakat Tionghoa ke dalam masyarakat Pribumi, menghilangkan seluruh ciri dan identitas Tionghoa mereka. Padahal, kebijakan ini bertujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam asimilasi etnis Tionghoa, budaya mereka dianggap asing sehingga mengharuskan mereka meninggalkan budaya tersebut, namun dalam praktiknya lagi-lagi menimbulkan permasalahan. Hal ini masih diperparah dengan kecemburuan sosial terhadap etnis Tionghoa yang membuat posisi mereka semakin terisolasi dengan segala pembatasan yang diterapkan oleh kebijakan tersebut.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pratiwi (2019), bahwa:

“Istilah asimilasi berasal dari kata latin *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses ini ditandai dengan upaya untuk mereduksi perbedaan antar individu atau kelompok masyarakat. Ketika individu berasimilasi ke dalam suatu kelompok, hal ini berarti terjadi peleburan budaya individu-individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Secara umum proses peleburan ini melibatkan pertukaran

unsur budaya. Pertukaran ini dapat terjadi ketika suatu kelompok tertentu menyerap budaya kelompok lain.”

Kebijakan asimilasi tersebut dapat didasarkan pada konsep bangsa Indonesia berdasarkan model penduduk asli. Ini adalah konsep Pribumi, yang menyatakan hak atas tanah dan karena itu mempunyai hak yang lebih besar dibandingkan pendatang. Seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia dinyatakan Pribumi karena tanah kelahirannya berada dalam wilayah Republik Indonesia, sedangkan suku Tionghoa berasal dari Tiongkok sehingga sudah lama dianggap asing. Jika mereka ingin menjadi orang Indonesia, satu-satunya cara yang dapat diterima adalah dengan berbaur dengan penduduk asli Indonesia (Suryadinata, 2010, hlm. 220).

Pada masa Soeharto, baru diterapkan kebijakan asimilasi yang menyeluruh. Soeharto sendiri menegaskan bahwa etnis Tionghoa harus segera berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan karena pemerintah menemukan adanya keterlibatan etnis Tionghoa dalam kegiatan PKI. Selain itu, etnis Tionghoa yang sebelumnya menolak kebijakan asimilasi, salah satunya adalah etnis Tionghoa dari organisasi Baperki. Situasi ini membuat pemerintah berspekulasi bahwa etnis Tionghoa diduga memiliki hubungan dengan politik sayap kiri yang terkait dengan komunis dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), dan keturunan Tionghoa juga dianggap sebagai agen komunis, meskipun mereka berkewarganegaraan Indonesia.

Setelah diresmikan, kebijakan asimilasi diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang sosial dan budaya. Dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, secara langsung menutup ruang bagi etnis Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan. Selain untuk menciptakan asimilasi penuh, pemerintah menggunakan kebijakan asimilasi ini sebagai alat untuk memantau pergerakan etnis Tionghoa di Indonesia. Penerapan kebijakan asimilasi di bidang sosial budaya etnis Tionghoa di Indonesia secara perlahan terkikisnya budaya etnis Tionghoa. Ruang gerak mereka sangat terbatas sehingga mereka tidak bisa melawan kebijakan-kebijakan yang menindas dan menguras energi mereka. Mereka juga tidak mau mempertegas stereotip bahwa mereka adalah kelompok eksklusif dan tidak bercampur, sehingga mereka memilih mengikuti kebijakan asimilasi pemerintah, meski banyak kendala yang mereka

hadapi. Hal ini menutup ruang gerak etnis Tionghoa, khususnya di bidang sosial budaya.

Dalam proses diterapkannya kebijakan asimilasi yang fokus pada bidang sosial budaya, namun dalam implementasinya kebijakan asimilasi ini juga diterapkan pada seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada bidang sosial budaya saja, karena bidang ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap identitas dan eksistensi budaya Tionghoa di Indonesia. Dalam implementasinya, kebijakan asimilasi juga berdampak signifikan terhadap keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dan pemerintah sendiri, dampak yang ditimbulkan pun beragam.

Pemerintahan Orde Baru hanya sepakat untuk mengintegrasikan keturunan Tionghoa ke dalam kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi, melaksanakan program stabilisasi dan pemulihan ekonomi, melaksanakan kebijakan ekonomi sistem pasar bebas. Pemerintah Orde Baru menggunakan pengusaha Tionghoa sebagai umpan untuk menarik investor asing agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia (Masoed, 1987). Asimilasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melibatkan penggabungan, dimana suatu kelompok tertentu mengambil identitas kelompok lain. Hal ini terlihat ketika pemerintah menggunakan keturunan Tionghoa untuk menerapkan strategi politik-ekonomi dan sebaliknya. Keberhasilan ekonomi etnis Tionghoa akibat kebijakan pemerintah Orde Baru melahirkan beberapa konglomerat. Misalnya saja Liem Sioe Liong (Sudono Salim) atau dikenal dengan panggilan Om Liem, ia adalah pendiri Salim Group, dan pada awal pemerintahan Soeharto, Liem adalah orang yang dipercayai Bulog untuk mendatangkan 35.000 ton beras pada tahun 1967. Berikutnya adalah Eka Tjipta Widjaja yang merupakan pendiri Sinar Mas Group, salah satu konglomerat Indonesia pada masa Orde Baru. Dan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru banyak didominasi oleh konglomerat Tionghoa lainnya.

Munculnya persaingan bermula dari keunggulan kalangan Tionghoa dalam memenangkan persaingan ekonomi. Keunggulan ekonomi etnis Tionghoa menimbulkan rasa iri dan kebencian terhadap etnis lain, yang pada akhirnya



menimbulkan prasangka. Hingga saat ini, persepsi yang meluas terhadap etnis Tionghoa di Indonesia adalah stigma bahwa etnis Tionghoa adalah “binatang ekonomi” (*economic animal*) yang oportunistik, tidak memiliki loyalitas politik, dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri (Kwartanada, 1996). Namun, jika dibandingkan dengan nasib masyarakat Indonesia lainnya, nasib etnis Tionghoa secara politik kurang beruntung. Di masyarakat Indonesia, mitos mengenai keunggulan ekonomi etnis Tionghoa juga semakin berkembang sehingga akibat mitos tersebut mereka kerap menjadi sasaran kecemburuan.

Tahun 1971 merupakan tahun pemilu pertama pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, tumbuh antusiasme yang besar antara elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang menyambut pemilu 1971 untuk ikut serta mendukung program pembangunan pemerintahan baru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatah (2000) bahwa:

“Pada saat inilah kesenjangan antara negara dan masyarakat mulai terbentuk, ditandai oleh maraknya gelombang demonstrasi dan protes terhadap kinerja negara Orde Baru dan kebijakannya, dan berpuncak pada terjadinya Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).”

Kemudian pada penghujung tahun 1973, situasi memanas dikalangan mahasiswa akibat kegelisahan yang dirasakan masyarakat sehubungan dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Fokus mereka adalah korupsi, percukongan, modal asing, dan peran Jepang. Istilah “cukong” adalah pengusaha Tionghoa yang kaya dan biasanya memiliki hubungan dekat pihak penguasa (Assidiqi, 2018). Dalam pandangan mahasiswa, pelaksanaan pembangunan terlalu banyak mendatangkan modal asing. Protes ini berkembang menjadi tindakan rasis anti-Tionghoa, penghancuran dan penjarahan toko-toko etnis Tionghoa.

Protes ini akhirnya meledak pada tanggal 15 Januari 1974 menjadi kerusuhan yang dikenal dengan Peristiwa Malaria (Malapetaka Limabelas Januari). Peristiwa tersebut ditandai dengan perusakan toko-toko milik etnis Tionghoa. Sejak saat itu, pemerintahan Orde Baru mulai menerapkan kebijakan ekonomi untuk membatasi dominasi etnis Tionghoa dan pihak asing dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mencegah aksi protes terulang kembali. Setelah

periode ini, muncul ungkapan Pribumi dan non-Pribumi, serta penggunaan ungkapan tersebut dijadikan kritik terhadap pengusaha etnis Tionghoa. Saat Orde Baru berkuasa, banyak etnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, adanya pembatasan seperti perbedaan nama etnis Tionghoa dan masyarakat Pribumi menimbulkan kesenjangan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Fatah (2000) bahwa:

“Perkembangan yang terlihat kemudian adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkaran kekuasaan dan proses formulasi kebijakan.”

Selain itu, pada tahun 1976 hingga 1986, terus menerus terjadi kerusuhan yang melibatkan etnis Tionghoa atau etnis lain, sehingga menjadikan permasalahan di Indonesia menjadi sangat pelik. Pada tahun 1978 dikeluarkan kebijakan kepada etnis Tionghoa yaitu Keputusan Menteri Kehakiman No. J.B.3/4/12 yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) sebagai bukti kewarganegaraannya. Pada tahun 1984, terjadi peristiwa berdarah di Tanjung Priok yang memakan korban jiwa.

Kejadian ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang sengaja memasang poster beraroma unsur sara, menentang kebijakan pemerintah dan menolak asas tunggal Pancasila (Poesponegoro, 2010, Hlm. 643). Peristiwa malam berdarah itu mendapat reaksi beragam dari masyarakat dan media, yang menyarankan agar pemerintah membuat kerangka opsi keempat untuk mengatasi kerawanan sosial. Kerawanan sosial menjadi penyebab terjadinya insiden di Tanjung Priok. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap semakin dalamnya ketidakamanan sosial, yaitu ketidakamanan sosial dapat berujung pada gejolak atau revolusi.

Dan pada tahun 1986 hingga tahun 1998 khususnya pada tahun 1991 terjadi peristiwa yang paling terkenal yaitu Pembantaian Santa Cruz atau Peristiwa Dili yang terjadi pada tanggal 12 November 1991. Peristiwa ini terjadi di Dili, Timor Timur (sekarang Timor Leste) saat provinsi tersebut masih bagian dari Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, terjadi penembakan massal terhadap pengunjung rasa pro-

kemerdekaan di Timor Timur. Demonstrasi ini diselenggarakan sebagai penghormatan kepada aktivis kemerdekaan Sebastião Gomes, yang meninggal beberapa hari sebelumnya. Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan merupakan bagian dari genosida Timor Timur (Poesponegoro, 2010, Hlm. 648).

Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, di anggap sebagai masa dimana terjadi berbagai sentimen negatif terhadap dominasi etnis Tionghoa di Indonesia. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia, termasuk Indonesia semakin menimbulkan rasa ketidak puasan di kalangan masyarakat Pribumi terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Sorotan massa atas maraknya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ditubuh pemerintahan Orde Baru dipandang sebagai suasana yang memperburuk perekonomian masyarakat. Ditambah lagi bahwa anggapan terhadap para pengusaha Tionghoa yang menyokong pemerintah Orde Baru.

Hingga puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah dan yang terparah, khususnya di Jakarta. Kerusuhan ini kemudian mengundang berbagai tindakan aksi rasial etnis Tionghoa di berbagai daerah, seperti Solo, Pekalongan, Sitobondo, dan Makasar. Aksi ini pun melebar sampai masalah SARA, terutama masalah tempat ibadah, baik Gereja, dan juga Klenteng (Setiono, 2008, Hlm. 105). Kegaduhan peristiwa itu membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia, termasuk etnis Tionghoa yang turut menjadi korban kerusuhan yang terjadi pada saat itu.

Pada saat itu berbagai konflik antar etnis merebak di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan asimilasi yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru, tidak mampu menjawab persoalan konflik etnis keturunan Tionghoa dengan Pribumi secara baik. Kerusuhan pada Mei 1998 membuktikan bahwa ada kekuatan politik, posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia sangat rentan terhadap konflik. Keyakinan kalangan etnis Tionghoa atas perlindungan dari para penguasa ternyata keliru. Pelanggaran hak asasi manusia (perampokan, penjarahan, serta pengrusakan toko-toko khususnya yang dimiliki oleh keturunan etnis Tionghoa), merupakan kejahatan nasional yang terjadi pada kurun waktu mei 1998.

Kasus Mei 1998 juga membawa dampak tersendiri bagi umat agama Khong Hu Chu yang ada di Klenteng Boen Bio, Surabaya. Meskipun pada dasarnya kerusuhan Mei 1998 yang ada di Surabaya tidak sebesar seperti yang terdapat di Jakarta dan Solo, akan tetapi dampaknya masih bisa dirasakan oleh umat agama Khong hu Chu di Klenteng Boen Bio (Fitrya, 2013). Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, yang kemudian meluas ke beberapa wilayah lainnya. Rumah, toko, dan apa pun yang dianggap milik etnis Tionghoa dirusak dan dijarah. Selama kerusuhan, kawasan pemukiman yang sebagian besar dihuni warga Tionghoa juga hancur. Sore harinya terjadi kerusuhan di kawasan Jembatan Sempit Angke, Jembatan 2, Jembatan 3 dan Jembatan Besi berupa aksi perusakan dan penghancuran yang melibatkan isu rasial anti Tionghoa. Geng tersebut mulai menjarah rumah warga dan beberapa toko bahkan membakarnya (Kasenda, 2015, Hlm.146). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasenda (2015) bahwa:

“Wilayah Pecinan mengalami kerusakan parah. Daerah Glodok, yang paling tua dibangun pada tahun 1974 setelah kerusuhan anti-Tionghoa mengalami perusakan. Termasuk rumah cukong Soeharto, Liem Sioe Liong. Begitu pula wilayah Kota sampai Senen lewat Mangga Besar dan Pasar Baru yang merupakan wilayah hunian etnis Tionghoa pertama. Wilayah lain yang mengalaminya adalah Ciledug, di sebelah barat Kebayoran. Kerusuhan juga melanda dari Grogol sampai Cengkareng sepanjang Jalan Daan Mogot. Perusakan terjadi terjadi pula di perumahan yang lebih baru di Pluit.”

Pada tanggal 16 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR/MPR. Mereka terus berdatangan memenuhi gedung bahkan terkadang naik ke atap gedung. Presiden Soeharto kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di hadapan wartawan media pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Hal ini membuat masyarakat mengungkapkan kegembiraannya dalam berbagai ekspresi di jalanan maupun di Gedung DPR. Gerakan reformasi Indonesia pada pertengahan tahun 1998 rupanya memberikan dampak yang besar baik bagi masyarakat Indonesia maupun etnis Tionghoa di Indonesia.

Berdasarkan yang sudah di paparkan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Kebijakan Asimilasi Masa Pemerintahan Orde Baru Terhadap Perkembangan Identitas Etnis Tionghoa Tahun 1966-1998”**. Periode ini dipilih karena pada masa pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan asimilasi untuk meleburkan kebudayaan etnis Tionghoa ke dalam budaya masyarakat Indonesia demi tercapainya keharmonisan antar bangsa dan menghilangkan stereotip negatif yang terkait dengan etnis Tionghoa. Dalam pelaksanaannya, kebijakan asimilasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru menemui beberapa kendala, aturan-aturan yang harus dilakukan untuk melakukan asimilasi tersebut cenderung diskriminatif dan membatasi ruang gerak kehidupan etnis Tionghoa.

Oleh karena itu, penulis menganggap hal tersebut menjadi masalah yang dapat di kaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa yang meliputi masalah-masalah kebijakan dan pola pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah utama yaitu **“Bagaimana pelaksanaan kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa yang mempengaruhi identitas sosial budaya tahun 1966-1998?”**. Untuk membatasi penulisan, maka penulis membagi ke dalam tiga pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap identitas sosial budaya etnis Tionghoa tahun 1966-1998?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru terhadap identitas sosial budaya etnis Tionghoa tahun 1966-1998?
3. Bagaimana dampak kebijakan asimilasi yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru terhadap identitas sosial budaya etnis Tionghoa?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok pikiran di atas, tujuan penulisan utama yaitu menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Oleh karena itu penulis membuat tiga tujuan penulisan yaitu:

1. Mendeskripsikan latar belakang pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap identitas sosial budaya etnis Tionghoa tahun 1966-1998
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru terhadap identitas sosial budaya etnis Tionghoa tahun 1966-1998
3. Menganalisis dampak kebijakan asimilasi yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru terhadap identitas sosial budaya etnis Tionghoa.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan yang dilakukan ini diharapkan nantinya akan memiliki manfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang bagaimana pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa, yang dimana kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi etnis Tionghoa karena kebijakan tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan terutama dalam bidang sosial dan budaya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat bermanfaat sebagai referensi kajian tentang perkembangan etnis Tionghoa di Indonesia dalam bidang sosial dan budaya pada masa Orde Baru.
- b. Dapat menambah wawasan bagi pembaca untuk menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhkan sentimen etnis khususnya etnis Tionghoa.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber ataupun acuan guru dan siswa dalam pengembangan materi sejarah terkait dengan materi kelas XII Sejarah Indonesia, kompetensi dasar 3.7 yang berisikan “Mengevaluasi

peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia”. Pada kompetensi dasar tersebut memberikan materi mengenai Penguatan Pemerintahan pada masa Orde Baru, Krisis Multidimensional, Ciri, Agenda dan proses Reformasi, Kronologi terjadinya suksesi politik. Dan pembahasan mengenai etnis Tionghoa dijelaskan pada bagian krisis multidimensional.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi ini berperan sebagai pedoman penulis untuk menyusun penulisan skripsi secara lebih terarah, maka penulis menyusun struktur organisasi skripsi yang berisi urutan penulisan Bab 1 hingga Bab terakhir sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang segala hal yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penulisan ini, didalamnya mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi dan sistem penulisan, yang pada akhirnya memiliki keterkaitan dengan bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian Pustaka yang berisi tentang hal yang berkaitan dengan konten penulisan seperti teori yang menjadi rujukan dalam keterkaitannya dengan judul penulisan ini. Pada bab ini juga mencantumkan penulisan terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang metode-metode apa yang digunakan oleh penulis untuk menyusun karya tulis ini. Isi dari bab ini cukup penting karena memiliki keterkaitan dengan bab-bab setelahnya, jadi metode penulisan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan sebuah penulisan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan yang berisi isi atau inti dari penulisan yang dilakukan, pada bab ini semua konten yang diangkat dalam penulisan ini akan dipaparkan. Dari semua sumber-sumber yang telah didapat dan dibuktikan keasliannya akan diolah kembali dan dikembangkan dalam bab ini. Bab ini juga

menjadi jawaban dari rumusan masalah penulisan dan interpretasi dari latar belakang penulisan pada bab I.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini. dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi untuk hal yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini untuk penulisan selanjutnya.



